# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan yang ada dalam hasil penelitian dalam bab ini berisi pandangan akhir sesuai dengan tahap perumusan masalah yang telah ada. Dengan demikian kesimpulan berisi pandangan akhir tentang "Rekrutmen Non Kader PDI Perjuangan dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2015".

1. Ada beberapa motif PDI Perjuangan dalam mengusung Tri Risma Harini pada Pilwali Kota Surabaya Tahun 2015. Melalui pendekatan fenomenologi, diidentifikasi 2 motif sebagai berikut: motif *Because of* dan motif *In Order to*. Motif *Because of* meliputi: *Pertama,* ialah elektabilitas dan popularitas. *Kedua,* ialah prestasi, *Ketiga,* ialah problem rekrutmen partai politik. Sedangkan motif *In Order to* meliputi *Pertama,* ialah peluang Risma untuk menjadi pemenang. *Kedua,* ialah kelanjutan program kerja PDI Perjuangan. Proses perekrutan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Apabila kader sendiri diperhatikan dan melalui proses rekrutmen yang sesungguhnya, tentu partai politik lebih percaya diri mengusung kader dalam konstentansi pemilihan umum. Problem demikian juga dialami oleh PDI Perjuangan karena lebih memilih hal praktis asal bisa meraih kemenangan. Model pengambilan keputusan di internal PDI Perjuangan pada pemilihan walikota Surabaya tahun 2015 ini menggambarkan sentralisasi partai. Sentralisasi partai ini



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari bagaimana aspirasi dari seluruh PAC di Surabaya menginginkan Wisnu sebagai calon walikota. Sedangkan hal tersebut berbeda dengan keputusan elite partai di DPP yang merekrut Risma sebagai calon walikota. Pada praktiknya selain sentralisasi, kedudukan patronase kekuasaan juga terjadi di PDI Perjuangan, di mana ketua umum dalam hal ini ialah Megawati memiliki kekuasaan penuh dalam putusan akhir.

2. Selain tidak berjalannya sistem perekrutan, PDI Perjuangan juga menerapkan desentralisasi. Di mana keputusan pusat dalam hal ini DPP PDI Perjuangan harus dipatuhi. Keputusan DPP menjadi keputusan yang menentukan siapa calon yang diusung. Mendaftar menjadi Walikota bisa melalui DPC, DPD, DPP. Meskipun rekomendasi dari DPP namanya tidak mendaftar di DPC tetap saja harus dipatuhi. Keputusan DPP tersebut bisa memunculkan dinamika pada jajaran dibawahnya. Karena sebelum penetapan Risma sebagai calon kandidat. PAC di Kota Surabaya menginginkan Wisnu sebagai calon walikota. Namun DPP merekomendasikan nama Risma karena usulan dari masyarakat. Dinamika tersebut bisa memicu munculnya faksi, namun faksi yang muncul bukan dari internal PDI Perjuang. Terlepas dari dinamika yang terjadi atau bahkan faksi, PDI Perjuangan bisa mengatasi. PDI Perjuangan beranggapan kalau perbedaan di suatu kehidupan politik memang hal wajar. Semua dinamika tersebut bisa segera mereda manakala SK DPP sudah turun dan harus dipatuhi oleh seluruh jajaran di bawahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih mendalam tentang perekrutan partai politik yang menjadi salah satu hal penting dalam menjaring atau mencalonkan kandidat partai politik. Dengan begitu diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dalam bidang gerakan sosial dalam ilmu politik.

1. Perekrutan partai politik sebaiknya mengikuti prosedur yang sudah diatur. Hal itu penting untuk dijadikan sebagai acuan supaya proses kegiatan dalam perekrutan partai politik tidak terganggu.
2. Keberadaan kader internal partai sebaiknya diutamakan dalah setiap momentum pemilihan umum. Kader sendiri sebaiknya lebih dirawat dan dipromosikan sehingga pemilihan umum tidak mengusung non kader. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada problem di internal partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id